KONSISTENSI NEGARA ASEAN DALAM MELAKSANAKAN AGENDA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Khaidir Idrus

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: The establishment of the AEC (ASEAN Economic Community) as a continuation of AFTA which is the ASEAN Trade Block as well as one of the pillars of the ASEAN Community (late-stage regionalism) is part of the trend of various formations of regional-economic groupings by the Nation-States that create a phenomenon called *Noodle Bowl Effect*. It is all the behavior of the State-Nation in its efforts to gain economic and political advantages, thereby the integration of the regional economy only a framework in the pursuit of national interest. So if the State-Nation feels harmed or does not gain economic and political advantage then the Nation-State shall abandon such groupings or form another similar grouping. The AEC is established on a Top-Down current and as a framework to improve the bargaining power of ASEAN Member States in the global association. The peak stage of integration by Balassa is the transfer of sovereignty by the related countries and the member states of the AEC are not yet ready to do so. Therefore we see contradictory and inconsistent attitudes in the AEC by the AEC Member States.

Abstrak: Terbentuknya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang merupakan blok ekonomi ASEAN sebagai kelanjutan dari AFTA yang merupakan Blok Perdagangan ASEAN serta salah satu pilar dari Masyarakat ASEAN (regionalisme tahap lanjut) merupakan bagian dari trend berbagai pembentukan pengelompokan ekonomi-regional oleh Negara-Bangsa yang menciptakan suatu fenomena yang disebut *Noodle Bowl Effect*. Itu semua merupakan perilaku Negara-Bangsa dalam upayanya memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi dan politik, dengan demikian integrasi ekonomi-regional tersebut hanya sebuah kerangka (*frame*) dalam mencapai kepentingan nasional. Sehingga jika Negara-Bangsa merasa dirugikan atau tidak memperoleh keuntungan ekonomi dan politik maka Negara-Bangsa akan meninggalkan pengelompokan tersebut atau membentuk suatu pengelompokan lain yang sejenis. MEA dibentuk berdasarkan arus top-down dan sebagai kerangka meningkatkan daya tawar Negara anggota ASEAN dalam pergaulan global. Tahap puncak dari integrasi menurut Balasa adalah penyerahan kedaulatan oleh negara-negara terkait dan Negara anggota MEA belum siap untuk melakukannya. Oleh karena itu kita melihat sikap-sikap kontradiktif dan tidak konsisten dalam MEA oleh Negara anggota MEA.

Kata Kunci: ASEAN, MEA, integrasi ekonomi, integrasi regional, pengelompokan ekonomi

PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau masyarakat-masyarakat ekonomi lainnya yang (pernah) ada di dunia saat ini merupakan pengelompokan ekonomi oleh Negara Bangsa. Pengelompokan ekonomi ini ada dua macam, yakni Blok Ekonomi dan Blok Perdagangan yang pada umumnya dibentuk dengan mengedepankan pendekatan geografis. Uni Eropa, karena kemapanannya kerap dijadikan *role model* dalam visi dan proses regionalisme politik dan ekonomi di belahan lain dunia, pada awalnya ternyata merupakan perkumpulan geo-ekonomi pasca Perang Dunia II yang kemudian bertransformasi menjadi perkumpulan geo-politik¹.

Sepertinya terdapat suatu kebiasaan di mana suatu Negara Bangsa memiliki lebih dari satu pengelompokan ekonomi yang bahkan saling tumpang tindih satu sama lain yang melahirkan suatu fenomena yang disebut sebagai *Noodle/Spaghetti Bowl* karena begitu kusutnya pola-pola pengelompokan ekonomi yang dihasilkan.

Trend pengelompokan ekonomi ini bukan hanya terjadi di era Pasca Perang Dingin namun juga pernah berkembang di era Perang Dingin. Perilaku Negara-Bangsa untuk berkelompok ini juga terwujud dalam berbagai bidang, bukan hanya di bidang ekonomi, pertahanan-keamanan namun juga politik, sosial-budaya hingga ilmu pengetahuan.

Ada dua hal yang menarik perhatian dari perilaku Negara Bangsa di Asia Tenggara dalam upaya menyatukan perbedaan potensi ekonomi

¹ Narihiro, *Regionalism in East Asia: The transformation of regional political economy in East Asia*, http://www.ps.ritsumei.ac.jp/assoc/policy_science/101/101_10_bono.pdf, diambil pada 24 Oktober 2015, 16:00 WIB.

ke dalam satu pasar bersama atau ke suatu blok perdagangan, yakni :

Pertama, langkah ASEAN dalam pengelompokan regional (*regionalism*) cenderung terbalik dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Eropa Barat dengan Masyarakat Ekonomi Eropa-nya. ASEAN pada tahun 1992 membentuk AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) sebagai upaya pengintegrasian sejumlah pasar ke dalam satu wadah bersama. Pada tahun 1992 tersebut, perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara ini mengalami proses transformasinya dari perkumpulan geo-politik menjadi geo-ekonomi (dari blok perdagangan menjadi blok ekonomi). Berbanding terbalik dengan langkah yang ditempuh di belahan Eropa sana, yakni melalui serangkaian pembentukan pengelompokan geo-ekonomi lalu bertahap mengerucut menjadi satu pengelompokan geo-politik².

Kedua, di tengah-tengah periode AFTA/Blok Perdagangan ASEAN tersebut, ASEAN dan Negara-negara Asia Tenggara juga mengikat diri mereka ke dalam blok-blok perdagangan regional, transregional dan bahkan multilateral lainnya. Tidak meliputi aneka perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN secara individual dengan negara-negara lainnya atau pengelompokan ekonomi lainnya. Tidak cukup dengan AFTA, pada tahun 2007, ASEAN memperluas AFTA menjadi AEC (*ASEAN Economy Community*) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (selanjutnya akan disebut MEA dalam tesis ini) yang berlaku per 1 Januari 2015.

AFTA adalah tahap berikutnya dalam proses integrasi ekonomi di Asia Tenggara. Secara ekonomi, AFTA dinilai gagal oleh banyak kalangan³, karena meskipun ia merupakan suatu blok perda-

gangan bebas namun pertumbuhan ekonomi anggotanya pada masa itu lebih disebabkan oleh meningkatnya perdagangan dengan negara di luar keanggotaan AFTA. Namun demikian secara politik, terutama politik ekonomi, ASEAN dengan AFTA dinilai cukup berhasil⁴. Hal ini telah diperkirakan oleh para pengamat, mengingat motif utama dibentuknya blok perdagangan adalah untuk meningkatkan daya saing dalam menarik perhatian investor asing yang sebagian besar berada di luar keanggotaan blok perdagangan itu⁵.

MEA sebagai suatu blok ekonomi merupakan tahapan lanjut dari regionalisme di Asia Tenggara yang berkembang dari blok perdagangan AFTA dan diarahkan untuk menyatukan keanekaragaman potensi ekonomi ASEAN ke dalam wadah Pasar Tunggal ASEAN. MEA diadakan dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan yang mengganggu kegiatan perekonomian lintas negara dalam kawasan ASEAN secara signifikan. Sebagai suatu Pasar Tunggal, MEA juga memberikan kebebasan mobilitas terhadap faktor-faktor produksi (orang, modal, barang, jasa dan kegiatan usaha). Cara-cara yang ditempuh, selain liberalisasi perdagangan (pengurangan dan penghilangan tarif), regulasi dan deregulasi, juga membentuk institusi bersama seperti Kesatuan Bea-Cukai (*custom union*).

Menurut Balassa, tahap awal Integrasi Ekonomi Regional, diawali oleh terbentuknya suatu blok perdagangan dengan cara mengurangi tarif dari barang dan jasa yang diperdagangkan oleh para anggotanya. Seluruh proses Integrasi Ekonomi Regional tersebut akan berakhir jika terjadi penyatuan Ekonomi-Politik, sebagai entitas baru di mana Negara-Bangsa pembentuknya menyerahkan seluruh maupun sebagian kedaulatannya kepada organisasi regionalnya.

Proses integrasi ekonomi regional tersebut menunjukkan adanya suatu siklus di mana sejumlah

² Perbedaan lebih lanjut mengenai model integrasi regional antara Uni Eropa dan ASEAN dapat dilihat di Brian Bridges, "Learning from Europe. Lessons for Asian Pacific regionalism?", *Asia Europe Journal* (2004) 2: 387-397.

³ Antara lain lihat Ryoichi Nomura, Takao Ohkawa, Makoto Okamura, and Makoto Tawada (2013), "Does a Bilateral FTA Pave the Way for Multilateral Free Trade?", *Review of International Economics*, 21(1):164-176, DOI:10.1111/roie.12028 atau Mark Beeson (2010), "Asymmetrical Regionalism: China, Southeast Asia and Uneven Development", *East Asia*, 27:329-343.

⁴ Linda Low (2004, May), A Comparative Evaluation and Prognosis of Asia Pacific Bilateral and Regional Trade Arrangements", *Asian-Pacific Economic Literature*, 18:1, 1-11.

⁵ Paul Bowles & Brian MacLean (1996), "Understanding trade bloc formation: The case of the ASEAN free trade area", *Review of International Political Economy*, 3:2, 319-348.

entitas negara membentuk satu entitas negara (konfederasi) lalu entitas tersebut bersama entitas lainnya membentuk entitas baru lagi yang bisa berbentuk federal atau konfederasi. Oleh karena itu, berdasarkan proses integrasi ekonomi regional di atas dan keberhasilan masyarakat Eropa Barat dengan Uni Eropa-nya, maka terbentuknya MEA sebagai kelanjutan proses Integrasi Ekonomi Regional di Asia Tenggara menjadi suatu titik krusial, karena jika MEA ini berhasil maka jalan menuju terbentuknya Konfederasi atau Federasi ASEAN ala Uni Eropa akan makin terbuka lebar.

METODE

Berdasarkan penjelasan permasalahan penelitian dan kerangka pemikiran, maka untuk mengetahui keadaan sebenarnya secara rinci dan aktual mengenai permasalahan penelitian ini dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan Paradigma Konstruktivis sebagai kerangka pikir utamanya, yaitu untuk menjelaskan perilaku Negara-Bangsa dalam menjalani proses dan dinamika integrasi ekonomi regional. Sedangkan Teori Integrasi hanya digunakan sebagai teori pembandingan untuk menjelaskan suatu fenomena yang dianalisis melalui Paradigma Teori Konstruktivis. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengarah pada penggunaan model penelitian metode Deskriptif Analistis, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menjadi bahasan tesis ini merupakan salah satu bagian dari proses integrasi regional di Asia Tenggara yang ditempuh oleh ASEAN. Regionalisme ekonomi di Asia Tenggara bermula dari pengelompokan geo-politik di Asia Tenggara pada tahun 1967 yang bernama ASEAN. Secara perlahan, ASEAN mulai menjadi pengelompokan geo-ekonomi pada tahun 1977 dengan ditandai oleh penyamaan tarif sejumlah produk

barang atau *Preferential Trade Agreement* (PTA) baik itu melalui skema ASEAN Industrial Projects (AIP) yang melahirkan industri pupuk urea di Indonesia maupun melalui skema ASEAN Industrial Joint Venture (AIJV). Proses ini berjalan tidak mulus, sejumlah hambatan dan inkonsistensi bermunculan dalam pelaksanaannya akibat membela kepentingan nasional masing-masing anggotanya, antara lain : (1) industri Pupuk Urea untuk pertanian negara ASEAN baru beroperasi pada tahun 1984⁶; (2) penentangan terhadap upaya Singapura mengembangkan industri diesel melalui skema AIP; (3) pembatalan sejumlah proyek AIP oleh Filipina dan (4) penutupan pabrik soda abu (*halite* bagian dari mineral *sodium klorida* untuk industri makanan khususnya garam) di Thailand akibat prospek bisnis yang kurang menguntungkan akibat tingginya harga bahan baku (*ammonia*) dan bahan bakar⁷.

Melalui AFTA, Negara ASEAN bersepakat untuk melakukan penyingkiran hambatan perdagangan di intra ASEAN melalui pengurangan tarif produk manufaktur yang setidaknya memiliki 40% kandungan ASEAN (*ASEAN content*) hingga menjadi 0%-5% untuk selama 15 tahun (kemudian dikurangi menjadi 10 tahun). Pada perkembangannya kemudian, produk pertanian yang tidak mengalami proses lebih lanjut (*unprocessed agricultural goods*) dimasukkan dalam arena perdagangan bebas dengan catatan bahwa itu merupakan 100% produk negara anggota ASEAN.

Pada periode AFTA ini, Negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN juga mulai memperluas pengelompokan geo-

⁶ Pada tahun 2016, PT. Pupuk Iskandar Muda mengakuisisi pabrik pupuk urea milik ASEAN ini setelah sebelumnya pabrik pupuk ini tersendat-sendat operasionalnya sejak tahun 2006 akibat ketiadaan pasokan bahan baku dan bahan bakar. PT. ASEAN Aceh Fertilizier ini 60% sahamnya dimiliki oleh Indonesia, Malaysia 13%, Filipina 13%, Thailand 13% dan Singapura 1%. Lihat Masriadi (2017), www.kompas.com, "Tahun Ini, Pupuk Iskandar Muda Akan Akuisisi Pabrik Pupuk AAF", <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/01/200000426/.tahun.inipupuk.iskandar.muda>. akan.akuisisi.pabrik.pupuk.aaf.

⁷ Japan International Cooperation Agency (Maret, 1981), Summary evaluation study report for ASEAN rock salt-soda ash project in the Kingdom of Thailand.

ekonominya dengan membangun institusi perdagangan bebas melalui kerjasama ekonomi dengan China, Jepang dan Korea Selatan yang disebut sebagai ASEAN +3 (ASEAN Plus Three) pada tahun 1992 dan kemudian membakukannya melalui pola bilateral pada 2010 antara ASEAN dengan Australia, China, India dan Korea Selatan.⁸

MEA yang dibangun berdasarkan inisiatif elite politik regional menjadi karakteristik berbeda dengan Uni Eropa. Integrasi ekonomi yang dibentuk memiliki jalan yang jauh berbeda dengan proses terbentuknya Uni Eropa sebagaimana yang diteorikan oleh Balassa, ASEAN tidak memiliki lembaga “*super body* yang mengatasi kedaulatan Negara-Bangsa” semacam Uni Eropa sehingga integrasi ekonomi di Asia Tenggara dinilai memiliki kelembagaan yang lemah. Ini adalah karakteristik yang *pertama*. Karakteristik *kedua*, menurut Lurong Chen (et.al), regionalisme Eropa Barat adalah untuk membenengi Eropa sedangkan Asia Tenggara lebih kepada penyesuaian akibat ketergantungan ekonomi Negara ASEAN kepada “dunia luar”; *ketiga*, tidak adanya “pemimpin regional” yang dominan, baik itu di Asia Timur maupun di Asia Tenggara.⁹ Sistem regional yang multipolar ini yang menjadi penyebab mengapa terjadi tarik menarik mengenai regionalisme di Asia.

Ponciano S. Intal, Jr. dan Lurong Chen juga mendukung mengenai inkonsistensi semangat perdagangan bebas tersebut dengan mengakui meningkatnya hambatan non tarif di Negara-negara MEA didorong oleh alasan-alasan non ekonomis.¹⁰ Aspek lainnya menurut mereka adalah kemauan politik (lambatnya, jika terlalu ekstrim menyebutnya dengan kata keengganan, Malaysia dalam meliberalisasi industri otomotif, perbankan dan keuangannya); dan kemampuan teknis birokrasi, seperti lambatnya pembangunan

national single window (sistem ekspor-impor satu atap berbasis IT) di Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja. Hambatan tersebut seperti halnya tidak sebanding dengan retorika pasar tunggal ASEAN.

Contoh lain dari inkonsistensi ini adalah Thailand, Pemerintah Thailand secara tersirat berharap Indonesia tetap mempertahankan kuota impor daging ayam dan pakan ayam (*quantity control measures*) dalam negeri guna melindungi peternak ayam lokal Indonesia karena pada dasarnya pasar ayam ternak Indonesia dikuasai oleh Charoen Pokphand Foods Indonesia (CPIN) yang merupakan anak perusahaan Charoen Pokphand Foods Group (CPF) Thailand. Jika Indonesia meliberalisasi pasar ayam ternak maka dominasi CPF Indonesia akan tergusur dengan sendirinya karena peternak ayam Indonesia akan memiliki sumber alternatif bagi produksi ayam ternaknya.¹¹

Pembentukan MEA merupakan langkah maju dalam proses integrasi regional karena MEA merupakan suatu Blok Ekonomi Regional sebagai kelanjutan dari AFTA (*ASEAN Free Trade Agreement*) yang merupakan suatu Blok Perdagangan. Namun demikian, Negara Anggota MEA secara unilateral masih dan terus mengembangkan jejaring ekonomi-perdagangannya dengan blok-blok ekonomi-perdagangan di luar kerangka ASEAN.

Brunei, Malaysia, Singapura dan Vietnam tetap melanjutkan membangun Blok Ekonomi lain, yakni TPP meskipun Amerika Serikat di era Presiden Trump telah menarik diri dari regionalisme tersebut. Malaysia bahkan terdepan dalam mengupayakan negosiasi ulang pembentukan TPP pasca keluarnya Amerika Serikat. Sedangkan negara anggota MEA lainnya, seperti Filipina, Indonesia dan Thailand sudah menyatakan minat untuk ikut bergabung.¹² Dari kesepuluh negara

⁸ Lihat Tabel 1.1. pada Bab I, halaman 3.

⁹ Lurong Chen, Ludo Cuyvers and Philippe De Lombaerde (2016), ASEAN Economic Integration Compared: What Do The Numbers Tell Us?, *The Singapore Economic Review*, Vol. 63, No. 1 (2018) 1840003.

¹⁰ Lihat Ponciano S. Intal, Jr. and Lurong Chen (2017), “The ASEAN Member States and ASEAN Economic Integration” dalam *ASEAN and Member States: Transformation and Integration*, ASEAN@50 Volume 3, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, Hlmn. 62-81.

¹¹ Lihat Pramdia Arhando Julianto (September, 2016), Kompas.com, “KPPU: Industri Unggas Indonesia Dikuasai Dua Pemain Besar”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/14/185135926/kppu.industri.unggas.indonesia.dikuasai.dua.pemain.besar>.

¹² Lihat David Smellie & Zachary Simon The Future of the Trans-Pacific Partnership, Vol. 39 Associate Editors, <http://www.mjilonline.org/the-future-of-the-trans-pacific-partnership/>. Mengenai Indonesia, Jokowi sendiri yang menyampaikan kepada Obama bahwa Indonesia

anggota MEA, Singapura dan Thailand adalah dua negara yang paling agresif dalam membangun blok-blok ekonomi-perdagangan. Singapura secara bilateral terlibat kesepakatan perdagangan bebas dengan Jepang, Selandia Baru, Kanada, India, Mexico, Amerika Serikat, Indonesia (khusus pulau Batam dan Bintan), Australia, Uni Eropa, dan EFTA (*Europe Free Trade Association*).¹³ Sedangkan Thailand membangun blok perdagangan bebas bilateral dengan Australia dan Jepang.¹⁴

Keterlibatan aktif sejumlah negara ASEAN dalam pengelompokan ekonomi regional seperti TPP ternyata dinilai dapat mengganggu kebersamaan dan proyek integrasi ekonomi ASEAN. Inilah yang melatarbelakangi kesepakatan pada KTT ASEAN ke-21 di Kamboja (November 2012) untuk membentuk pengelompokan ekonomi yang lebih besar dari MEA bahkan TPP, yakni apa yang dinamakan dengan RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnerships*) karena terdiri dari MEA dan sepuluh mitra perdagangan bebas ASEAN (ASEAN+10), yakni dengan Australia, China, Jepang, India, Korea Selatan dan Selandia Baru. Namun, dengan ketiadaan pemimpin regional yang kuat di Asia Tenggara, RCEP maupun MEA sepertinya belum mampu mencegah negara anggota ASEAN untuk melirik potensi lain diluar ASEAN.¹⁵

Di luar kerangka ASEAN setidaknya ada tiga pengelompokan geo-ekonomi yang relatif lebih besar dari MEA, yakni APEC, TPP (*Trans Pasific Partnerships*) dan CEPT (*Comprehensife Economic Partnership for East Asia*). Dengan mundurnya Amerika Serikat, maka menyisakan China dan Jepang sebagai kekuatan ekonomi yang paling mungkin mempengaruhi negara-

negara MEA maupun MEA sebagai entitas tersendiri.

Integrasi ekonomi bukan hanya bermaksud mencapai tujuan-tujuan ekonomi saja namun juga tujuan-tujuan politik dan keamanan, sebagaimana yang berlaku pada Uni Eropa dan ASEAN. Motif lainnya adalah secara bersama (kolektif) memperkuat posisi tawar dalam berbagai negosiasi politik-ekonomi internasional, ini merupakan kasus yang terjadi pada ASEAN di mana inisiatif integrasi ekonomi berasal dari “*top-down*” yang terutamanya didukung oleh faktor geopolitik, yang mana pengelompokan geo-politik (ASEAN) menyediakan payung pengaman bagi negara anggota ASEAN untuk mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi nasional mereka.¹⁶

Payung pengaman ini ditujukan kepada kekuatan ekonomi-politik di sekitar ASEAN, jika pada awal pembentukannya adalah ancaman komunisme dan pada era AFTA adalah pertarungan geo-ekonomi antara Amerika Serikat, Jepang dan China maka di era MEA ini ancamannya adalah China.¹⁷ AFTA dan MEA diperlukan oleh negara anggota ASEAN untuk memperkuat Asia Tenggara sebagai tempat investasi dan pusat produksi bagi pasar global dalam persaingannya dengan China. Krisis Keuangan 1997 juga menjadi pendorong untuk meningkatkan kerjasama antar institusi keuangan sesama Negara ASEAN.

Selain ditujukan kepada kekuatan di luar ASEAN, ASEAN juga berperan sebagai payung pengaman bagi internal Asia Tenggara karena integrasi regional di Asia Tenggara pada dasarnya dibangun berdasarkan persaingan sosio-politik terhadap distribusi serta pemanfaatan sumberdaya dan peningkatan kekuatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara (terutama pasca Perang Dingin atau sejak era AFTA). ASEAN bisa melangkah sejauh ini dan menjadi rujukan regionalisme selain Uni Eropa, menurut Amitav Acharya dikarenakan ASEAN memiliki norma

ingin bergabung ke dalam TPP *Agence France-Presse in Washington (27 October 2015). “Indonesia will join Trans-Pacific Partnership, Jokowi tells Obama”,* <https://www.theguardian.com/world/2015/oct/27/indonesia-will-join-trans-pacific-partnership-jokowi-tells-obama>.

¹³ EFTA adalah bagian dari Uni Eropa untuk negara-negara yang belum siap atau tidak mau bergabung ke EEC (*Europe Economic Community*), anggotanya terdiri dari : Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Switserland.

¹⁴ Deddy Saleh, “Indonesia’s FTA Policy and Its Perspectives on an East Asian FTA” dalam *Y. Ahn et al (ed, 2005.), East Asian Economic Regionalism*, 75-94.

¹⁵ Kristy Hsu, “Asean Centrality: A Quest For Leadership Role In East Asian Economic Integration”, *Public Policy and Governance*, Volume 24 : 69-105.

¹⁶ Siow Yue Chia (2016), *Modalities For Asean Economic Integration : Retrospect And Going Forward*, *The Singapore Economic Review*, Vol. 63, No. 1 (2018).

¹⁷ Alfredo C. Robles Jr. (2004), *The ASEAN free trade area and the construction of a Southeast Asian economic community in East Asia*, *Asian Journal of Political Science*, 12:2, 78-108.

yang berlaku umum sebagai identitas bersama ASEAN yakni “ASEAN Way” yang diformulasikan sebagai “kebijakan non intervensi”; “mengedepankan terbentuknya konsensus” dan “tawar-menawar non-konfrontatif” yang juga diakui.

Meskipun Chia dan Alfredo C. Robles Jr. mengakui norma ASEAN Way memiliki peranan dalam integrasi regional di Asia Tenggara namun mereka juga menilai bahwa norma tersebut justru menjadi faktor penghambat utama proses integrasi ekonomi dalam kerangka MEA sehingga menjadikan seluruh agenda integrasi regional berdasarkan pada komitmen dan bukan pada sanksi.¹⁸ Menurut David Martin Jones, norma tersebut hanya cocok untuk interaksi antar pemerintah dan lembaga birokrasi terbatas namun tidak pas jika diterapkan dalam pengelompokan yang lebih luas dan dalam seperti halnya pada proses pengelompokan ekonomi yang mana kebijakan-kebijakan politik ekonomi tersebut akan menjadi kerangka bagi para pelaku ekonomi regional.¹⁹ Trend peningkatan Hambatan Non-Tariff dalam MEA merupakan pertanda belum adanya harmonisasi hukum dan aturan main yang baku dalam MEA.

Hambatan lain adalah kurang tersosialisasinya atau bahkan kurang mengakarnya gagasan MEA karena MEA ini merupakan proyek para elite politik-ekonomi negara Asia Tenggara (*top-down*) bukan merupakan kehendak masyarakat nasional masing-masing negara Asia Tenggara. Ini yang menjelaskan mengapa kesepakatan-kesepakatan diplomatik dalam perundingan MEA bertolak belakang dengan realitas lapangan sehingga Pemerintah Nasional atas tuntutan dan tekanan domestik kadangkala membuat kebijakan yang menghambat dan bahkan bertentangan dengan agenda MEA.

SIMPULAN

Bagi negara-negara ASEAN dalam konteks keberlangsungan AFTA menjadi MEA, dua

faktor pengelompokan tersebut di atas, dilengkapi oleh tujuan utama yakni meningkatkan daya tawar dalam ekonomi-politik internasional, bukannya daya saing. Ini didasarkan pada: tidak sinkronnya antara pelaksanaan agenda Pasar Tunggal MEA dan Basis Produksi Tunggal MEA, yang diperkuat oleh rendahnya perdagangan intra-ASEAN dibandingkan dengan perdagangan negara ASEAN dengan negara Non-ASEAN serta trend peningkatan Hambatan Non Tarif dalam MEA (meningkatnya proteksionisme). Dengan demikian, Negara MEA tidak konsisten dalam melaksanakan agenda MEA.

Inkonsistensi tersebut merupakan suatu hal yang wajar karena hal-hal berikut: *pertama*, proses integrasi regional Asia Tenggara dimotori oleh Negara dan berlangsung secara *top-down*, bukan oleh masyarakat dan juga bukan secara *bottom-up* (seperti Uni Eropa). Sehingga proses integrasi regional tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika domestik nasional masing-masing negara MEA. *Kedua*, tujuan utama integrasi ekonomi regional Asia Tenggara adalah meningkatkan daya tawar ekonomi dan politik, bukan pada upaya *trade creation*. Terakhir, MEA dan AFTA merupakan integrasi ekonomi berlandaskan komitmen tanpa sanksi.

DAFTAR RUJUKAN

- Bela Balassa (2013), *The Theory of Economic Integration*, Routledge.
- Fredrik Söderbaum, “Theories of regionalism” dalam Beeson and Richard Stubbs (2012), *Routledge Handbook of Asian Regionalism*, hlm.11-21, Routledge.
- Jagdish Bhagwati and Anne O. Krueger (1995), *The Dangerous Drift to Preferential Trade Agreements*, The AEI Press.
- Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 112.
- Wahyu Daniel (2015), *AS Rayu RI Masuk TPP: SBY Menolak, Jokowi Menerima*, “Detikfinance”, Selasa, 27 Oktober 2015, pukul 10:54 WIB, <http://finance.detik.com/read/2015/10/27/103227/3054170/4/as-rayu-ri-masuk-tpp-sby-menolak-jokowi-menerima>.

¹⁸ Koesrianti (November, 2013), “Pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 : Integrasi Ekonomi berdasar Komitmen tanpa Sanksi”, *Law Review Volume XIII No.2*, 187-208.

¹⁹ David Martin Jones, “ASEAN’s Imitation Economic Community: The Primacy of Domestic Political Economy” dalam Bruno Jetin, Mia Mikic (eds.), (2016), *ASEAN Economic Community : A Model for Asia-wide Regional Integration*, Palgrave Macmillan US, 11-32.